

## **Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016**

Noor Mita Dewi

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia

### **Info Article**

#### *History Article:*

Submitted: 23 Februari 2019

Revised: 1 Maret 2019

Accepted: 23 Maret 2019

#### *Keywords:*

*institutional ownership, independent board of commissioners, audit committee and tax avoidance*

#### *JEL classifications:*

*Gxx Bxx Cxx*

*(maksimal tiga golongan, rujukan penggolongan dapat dilihat pada*

*<https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel>)*

### **Abstract**

This study aims to predict empirical evidence regarding the effect of institutional ownership, independent boards and audit committees partially or simultaneously on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016. Based on this, this study takes the title " The Influence of Institutional Ownership, the Independent Board of Commissioners and the Audit Committee on Tax Avoidance in Banking Companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2012 - 2016 ". The selected population of all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016. The sampling method used in this study is the cluster sampling method, which is a form of purposive sampling by taking a predetermined sample based on the aims and objectives of the study, which obtained 115 samples from banking companies. The data used are secondary data with linear regression data analysis. Based on the research results, it is known that institutional ownership has a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted. The independent board of commissioners has a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted. The audit committee has no significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016, so the hypothesis is rejected. Institutional ownership, independent board of commissioners and audit committee have a positive and significant effect on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2012 - 2016 so that the hypothesis is accepted.

How to Cite: Dewi, N.,M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM*, Vol.9(1), 40-51

□correspondence Address: Jl. Kedungmundu No.18, Kedungmundu, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50273

Institutional address: Universitas Muhammadiyah Semarang

E-mail: dewinoor@gmail.com

2086-0668 (P-ISSN)  
2337-5434 (e-ISSN)

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara akan membutuhkan dana yang banyak, dimana sebagai sumber pendanaan tersebut ada dua sumber antara lain sumber berasal dari pajak dan non pajak. Sumber yang terbesar adalah dari pajak yang bersumber dari dalam negeri sendiri (Damayanti dan Susanto, 2015). UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak sebagai penerimaan negara. Pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan (laba). Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak sekecil mungkin

Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal maupun ilegal menurut undang-undang atau disebut dengan tax avoidance dan tax evasion. Tax avoidance dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pohan, 2013). Hal tersebut berbeda dengan tax evasion yang bertujuan untuk penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, seperti dengan melaporkan penghasilan yang tidak sebenarnya dengan tingkat pengurangan pendapatan yang terlalu banyak. Dengan melihat hal tersebut masalah penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena mempunyai dua sisi yang berbeda. Di satu sisi penghindaran pajak (tax avoidance) diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain tax avoidance tidak diinginkan bahkan seringkali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif. Bagi pemerintah Indonesia, telah dibuat banyak aturan untuk menghindari adanya penghindaran pajak (tax avoidance).

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan berbagai macam tindakan antara lain pembentukan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam hal perpajakan perusahaan. Mekanisme corporate governance merupakan serangkaian peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem pengarah dan pengendali perusahaan.

Menurut Fazlzadeh et al., (2011) konsep struktur kepemilikan adalah subyek yang penting dalam konsep luas corporate governance. Menurut Dewi dan Jati (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak menurut beberapa penelitian juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan melalui komisaris independen. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Melalui komisaris independen yang berkewajiban melakukan pengawasan dan kontrol terhadap perusahaan agar aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu mekanisme dari sistem corporate governance adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Komite audit menurut Ikatan

Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan. Seorang komite audit diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai kewenangan pengawasan dan dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang benar karena semua perusahaan yang go public di BEI untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya penghindaran pajak.

### **Agency theory**

Agency theory atau teori keagenan dalam lingkup penghindaran pajak muncul ketika terjadi sebuah perbedaan kepentingan antara manajemen (agent) dan investor (principal). Manajemen mengetahui akan kinerja perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan informasi kepada manajemen. Menurut Jensen and Meckling dalam Rusydi dan Martani (2014) manager sebagai agent tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai principal. Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor menimbulkan agency problem sehingga diperlukan penerapan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan laba yang besar tentu beban pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak atau tax avoidance agar bisa membayar beban pajak yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Jaya, 2014). Menurut Faisal (2012), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

### **Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Sarra, 2012). Oleh karena itu dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam menentukan manajemen perpajakan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan.

### **Komite audit**

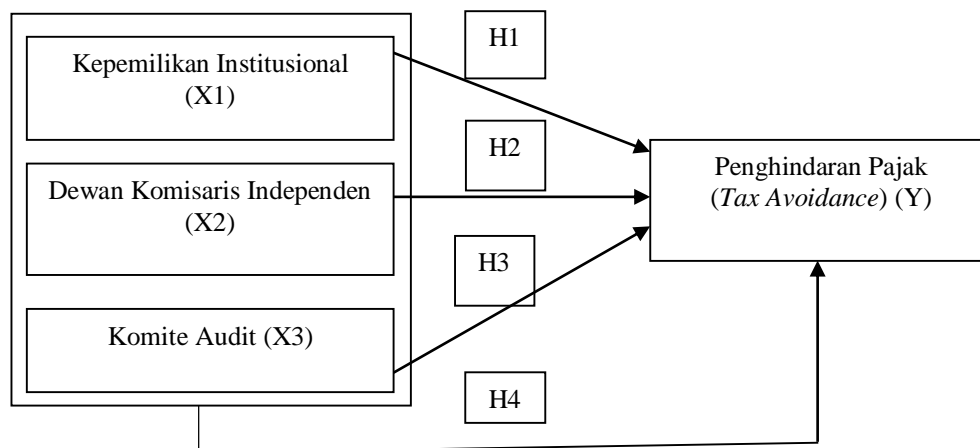
Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan

keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

### Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Khurana dan Moser (2009) penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan. Upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimisasi beban pajak dapat dilakukan melalui cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Kerangka konseptual penelitian



### Hipotesis Penelitian

- H1 :Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
- H2 :Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
- H3 :Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
- H4 :Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016

## 2. METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode cluster sampling, yaitu salah satu bentuk purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian (Supomo dan Indriantoro, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Supomo dan Indriantoro, 2012). Data sekunder diperoleh dari laporan tahunan yang didapat melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2012-2016 dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 - 2016. Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada), (Supomo dan Indriantoro, 2012). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Asumsi Klasik (Uji normalitas, Uji autokorelasi, Uji heterokedastisitas, Uji multikolinearitas). Analisis inferensial regresi linear berganda dan pengujian hipotesis (Uji t, Uji F dan Uji koefisien determinasi).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Deskriptif Statistik

Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan untuk periode pengamatan tahun 2012-2016. Gambaran umum sampel data penelitian dapat dilihat pada deskripsi statistik penelitian pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INST	115	46,39	98,27	72,3787	16,93966
INDEP	115	,00	66,67	32,0296	29,19970
CA	115	3	6	3,87	,996
ETR	115	,01	53,22	11,3201	8,58908

Sumber: data sekunder yang diolah SPSS , 2018

#### Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,75906629
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,081
	Positive	,081
	Negative	-,060
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,090 <sup>c</sup>

Sumber : data sekunder yang diolah SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan nilai Asymp Sig sebesar 0,090 dan diketahui bahwa tingkat signifikan variabel independen penelitian lebih dari nilai 0,05 maka model regresi terdistribusi normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas, oleh sebab itu dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

**Uji Autokorelasi**

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,473 <sup>a</sup>	,223	,200	4,82992	1,781

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS , 2018

Hasil analisis tabel summary model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi. Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan angka D-W adalah 1.781 dan dU = 1.7402 yang berarti berada dibawah angka 4 atau dengan kata lain nilai DW kurang dari (4-du) yaitu 4-1.7402 =2.2598 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,240	,589		,407	,685
INST	-,002	,004	-,055	-,457	,649
INDEP	,004	,003	,212	1,556	,123
CA	,036	,076	,061	,468	,641

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS , 2018

Berdasarkan tabel 4.5 di atas tidak terjadi heteroskedastisitas karena tingkat signifikan semua variabel di atas 0,05.

**Uji Multikolinieritas**

Pengujian ini untuk mengetahui adanya hubungan linear yang menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (independen) atau tidak kolinearitas diantara variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1 / tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai  $VIF < 10$  berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
INST	,652	1,534
INDEP	,514	1,946
CA	,562	1,780

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui model regresi yang bebas multikolinieritas karena koefisien regresi antar variabel independen mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**Analisis Inferensial (Analisis Regresi Linier Berganda)**

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan skala pengukuran dalam suatu persamaan linier. Hasil persamaan regresi pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan untuk periode pengamatan tahun 2012-2016 sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	-10,206	4,869
INST	,184	,035
INDEP	,069	,023
CA	1,039	,628

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Setelah melakukan perhitungan dengan regresi, dan menggunakan model yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh persamaan linear sebagai berikut :

$$Y = -10,206 + 0,184 X_1 + 0,069 X_2 + 1,039 X_3 \dots\dots\dots(2)$$

Jika melihat persamaan diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar -10,206 berarti apabila tidak ada pengaruh dari variabel-variabel bebas (X) atau bernilai 0 maka nilai penghindaran pajak (*tax avoidance*) penelitian sebesar -10,206.
2. Koefisien regresi INST (X<sub>1</sub>) sebesar 0,184 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh peningkatan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar 0,184 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.
3. Koefisien regresi INDEP (X<sub>2</sub>) sebesar 0,069 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.
4. Koefisien regresi CA (X<sub>3</sub>) sebesar 1,039 menunjukkan bahwa setiap perubahan sebesar 1 akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Y) sebesar 1,039 dengan asumsi variabel lain konstan atau tidak berubah.

**Uji Parsial (Uji t)**

Menggunakan uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan sig dari t dengan tingkat signifikansi yang diambil dalam penelitian ini adalah 0,05 jika nilai sig dari t < 0,05 maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji t-statistik dari hasil pengolahan data program SPSS ditunjukkan pada tabel *Coefficients* , dengan t tabel sebesar 1,661 dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis tiap variabel independen adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
- b. Apabila nilai t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10,206	4,869		-2,096	,039
INST	,184	,035	,567	5,192	,000
INDEP	,069	,023	,372	3,028	,003
CA	1,039	,628	,194	1,654	,101

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 di atas untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis dengan uji parsial adalah :

1. Nilai signifikansi untuk pengaruh kepemilikan institusional (INST) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Perbandingan nilai t hitung sebesar 5,192 > t tabel yaitu sebesar 1,661.
2. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_1$  diterima yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014), Putranti dan Setiawanta (2015), Wijayani (2016) serta Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Nilai signifikansi untuk pengaruh dewan komisaris independen (INDEP) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 kurang dari 0,05 yaitu 0,003.
4. Perbandingan nilai t hitung sebesar 3,028 > t tabel yaitu sebesar 1,661. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_2$  diterima yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hardiningsih (2010) serta Putranti dan Setiawanta (2015) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
5. Nilai signifikansi untuk pengaruh komite audit (CA) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016 lebih dari 0,05 yaitu 0,101. Perbandingan nilai t hitung sebesar 1,654 < t tabel yaitu sebesar 1,661. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_3$  ditolak yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Damayanti dan Susanto (2015), Putranti dan Setiawanta (2015) serta Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## Uji F

Uji F digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara bersama-sama atau simultan. Dasar pengambilan keputusan untuk uji simultan antara variabel X dan Y adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas sig lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas 0.05 atau (sig < 0.05), maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya signifikan (terdapat pengaruh yang nyata).



2. Jika nilai probabilitas sig lebih besar dari nilai probabilitas 0.05 atau ( $\text{sig} > 0.05$ ), maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, artinya tidak signifikan (tidak terdapat pengaruh yang nyata).

Tabel 8. Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	671,320	3	223,773	9,592	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2332,817	100	23,328		
	Total	3004,138	103			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui hasil F hitung 9,592 dan tingkat probabilitas  $0,000 < 0,05$ , sehingga ada pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* secara simultan atau bersama-sama serta menunjukkan model regresi tersebut layak untuk diujikan ke pengujian selanjutnya.

Dengan demikian hipotesis  $H_4$  diterima yang menyatakan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dimana dalam penelitian ini menggunakan *Adjusted R Square* mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi pengaruh variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* perusahaan perbankan untuk periode penelitian tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,473 <sup>a</sup>	,223	,200	4,82992

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 di atas hasil uji regresi didapatkan angka koefisien *adjusted R Square* sebesar 0,200. Hal ini berarti bahwa sebesar 20 % *tax avoidance* (ETR) dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit. Sedangkan sisanya  $100\% - 20\% = 80\%$  kemungkinan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

### Pembahasan

#### Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung  $5,192 > t \text{ table } 1,661$  dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .
2. Dengan demikian semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal kepada perusahaan sehingga mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan salah satunya yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance***

1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung  $3,028 > t$  table  $1,661$  dan nilai signifikansi  $0,003 < 0,05$ .
2. Dengan demikian semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris independen maka *tax avoidance* juga akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris independen sehingga dapat mengurangi tanggung jawab dewan komisaris dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan.

### **Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance***

1. Hasil penelitian membuktikan tidak sesuai dengan hipotesis, bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini di buktikan dengan nilai t hitung  $1,654 < t$  table  $1,661$  dan nilai signifikansi  $0,101 < 0,05$ . Pelanggan.
2. Dengan demikian hasil penelitian ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya jumlah komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia

### **Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).**

1. Hasil penelitian membuktikan kebenaran hipotesis, bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016. Hal ini di buktikan dengan nilai F hitung  $9,592$  dan tingkat probabilitas  $0,000 < 0,05$ .
2. Sistem *corporate governance* yang dapat dilaksanakan dalam suatu perusahaan adalah pada kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dianggap keharusan agar nilai perusahaan dapat terus meningkat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan untuk periode pengamatan tahun 2012-2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
2. Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.
4. Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2016.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan laporan tahunan perusahaan (*company report*) yang hanya memberikan informasi terkait jumlah anggota komite audit tanpa mencantumkan gelar independensi dari masing-masing anggota maka penelitian ini hanya menggunakan proksi menghitung jumlah anggota komite audit.

## Saran

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan *company report* yang lebih lengkap terkait kualitas dan independensi komite audit sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah penilaian proksi komite audit lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dalam rangka melengkapi hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi *tax avoidance*.

## REFERENSI

- Ardyansah, Danis dan Zulaikha. 2014. Pengaruh *Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio* dan Komisaris Independen terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol.3, No.2, hlm 1-9.
- Cahyono, Deddy Dyas, Andini, Rita dan Raharjo, Kharis 2016, Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage (DER)* dan Profitabilitas (*ROA*) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013, *Journal of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*
- Damayanti dan Susanto, 2015, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI
- Damayanti, Fitri dan Susanto, Tridahas 2015, Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015*
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut, 2014. “Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Fadhilah, Rahmi. 2014. “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*”. *Respository Universitas Negeri Padang*.
- Faisal, 2012, Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan Dan Mekanisme *Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi Indonesia*. (7). hal. 197-208
- Fazlzadeh et al., 2011. *Tax Havens, Tax Avoidance, And Corporate Social Responsibility*. *Boston University Law Review*. Vol. 94: 337.
- Ghozali, Imam, 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Undip, Semarang
- Hardiningsih, Pancawati, 2010, “Pengaruh Independensi, *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan”. *Kajian Akuntansi*, Februari 2010, hal:61-67
- Hanum dan Zulaikha, 2013. Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance* terhadap *Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol 2, No. 2.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan
- Jaya, Tresno Eko, dkk. 2014. “*Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance*”. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Khurana, I, K dan W, J, Moser.2009.”*Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*”. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Ngadiman dan Puspitasari, Christiany. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Akuntansi Volume XVIII, No. 03, September 2014: 408- 421*.
- Pohan, Hotman T. 2013. Analisis pengaruh kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak Ditunda terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. (4). hal. 113-135.

- Puspitasari, F. dan Ernawati, E. 2010. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun 3, No. 2*
- Putranti, Anissa Setiawati dan Yulita Setiawanta, 2015, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*, *Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro*
- Rusydy, Khoiru dan Martani, Dwi. 2013. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap *aggressive tax avoidance*. *SNA 17 Mataram, Lombok. Universitas Mataram*.
- Sarra, Hustna Dara, 2017, Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014), *Competitive, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017*
- Sugiyono, 2010. *Metode penelitian manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro, 2012, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama BPFE, Yogyakarta.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wijayani, Dianing Ratna, 2016, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, *Corporate Governance* Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaraan Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014), *Jurnal Dinamika Dan Bisnis, Volume 13 No. 20 Oktober 2016*
- Zulaikha, dan Permana, Ahmad R. Dwi. 2015. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting vol.4 no.4 hal. 1-11 ISSN: 2355*